

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Bank Persero

Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah perseoran terbatas atau PT. Saham kepemilikan Persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah (Wikipedia, 2017). Persero diharapkan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan.

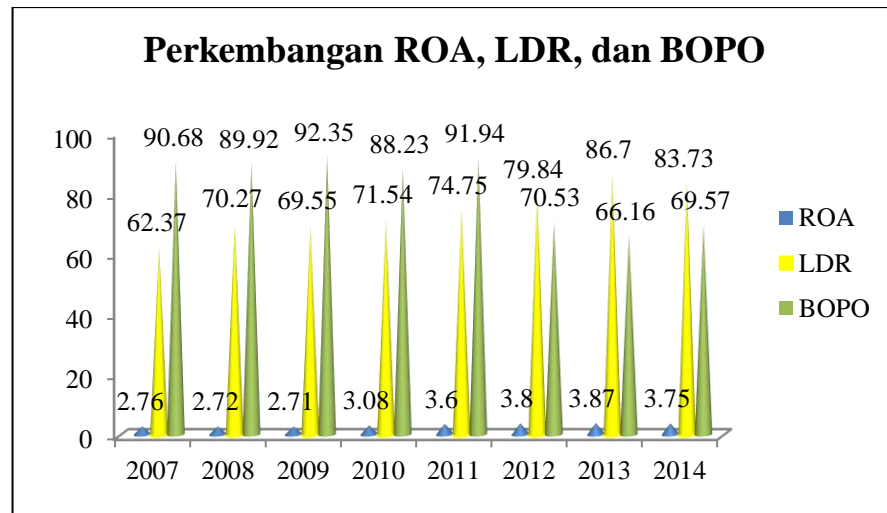
Organ Persero yaitu direksi, komisaris dan rups atau rapat umum pemegang saham. Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut (Wikipedia, 2017):

1. Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden.
2. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan.
3. Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang.
4. Modalnya berbentuk saham.
5. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
6. Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris.

7. Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah.
8. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas.
9. RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan.
10. Dipimpin oleh direksi.
11. Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan.
12. Tidak mendapat fasilitas Negara.
13. Tujuan utama memperoleh keuntungan.
14. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata.
15. Pegawainya berstatus pegawai Negeri.

Bank persero atau bank BUMN atau sering pula dikenal dengan nama bank pemerintah dikarenakan mayoritas atas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Pada awal tahun 2000 pemerintah melakukan restrukturisasi terhadap bank-bank atas dampak dari terjadinya krisis ekonomi. Bank persero yang semula berjumlah tujuh bank dilebur menjadi 4 bank. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan menggabungkan Bank Bumi Daya (BBD), Bank Pembangunan Indonesia (BPI) dan Bank Dagang Negara (BDN) menjadi Bank Mandiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia, bank persero sampai dengan tahun 2008 berjumlah lima bank (Wikipedia, 2017).

Berikut ini adalah grafik perkembangan rasio ROA, LDR, dan BOPO pada Bank Persero:



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2016 diolah

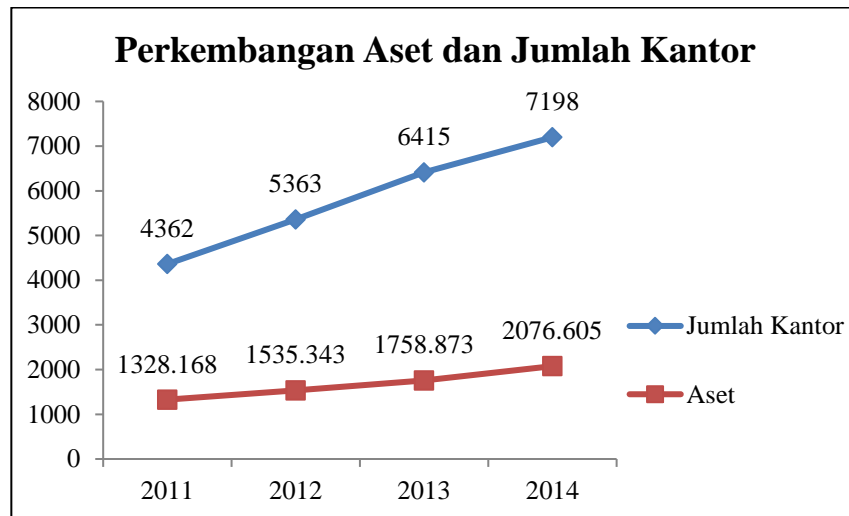
Gambar 4.1.

Perkembangan ROA, LDR, dan BOPO Bank Persero

Besarnya *Return On Assets* (ROA) Bank Persero sedikit mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Dari tahun 2007 sampai 2009 besarnya ROA ditahun 2007 sebesar 2,76%, pada tahun 2009 menurun hingga menjadi 2,71%. Ditahun 2010 sampai 2013 besarnya ROA mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebesar 3,08%, pada tahun 2013 meningkat hingga menjadi 3,87%, tetapi pada tahun 2014 kembali menurun menjadi 3,75%. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank menghimpun modal lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas (Kasmir, 2008).

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan indikator dalam pengukuran fungsi intermediasi perbankan di Indonesia. Ketentuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank persero untuk angka LDR seharusnya berkisar antara 85% - 110%, sedangkan, LDR pada bank persero pada tahun 2007-2014 masih berkisar pada angka 62,37% - 83,73%. Data diatas menunjukkan bahwa LDR Bank Persero pada tahun 2007-2012 masih berada dibawah harapan Bank Indonesia, dan pada tahun 2013 LDR bank Persero telah mencapai harapan Bank Indonesia sebesar 86,7%, akan tetapi di tahun 2014 sempat menurun kembali menjadi 83,73%.

Rasio BOPO (Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional) pada tahun 2007, 2009, 2011 adalah diatas 90% itu berarti bank tidak efisien dalam menjalankan operasinya, karena nilai BOPO seharusnya dibawah 90%, jika rasio BOPO yang dihasilkan suatu bank melebihi 90%, maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut tidak efisien dalam menjalankan operasinya. Hanya pada tahun 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 nilai BOPO berada kondisi yang efisien, laba yang diperoleh akan semakin besar karena biaya operasi yang ditanggung bank semakin kecil.



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2016 diolah

Gambar 4.2.

Perkembangan Aset dan Jumlah Kantor Bank Persero

Perkembangan aset dan jumlah kantor Bank Persero setiap tahunnya mengalami peningkatan. Aset Bank Persero pada tahun 2011 sebesar 1.328.168 miliar naik terus hingga tahun 2014 menjadi 2.076.605 miliar. Jumlah kantor Bank Persero pada tahun 2011 sebanyak 4.362 terus bertambah hingga tahun 2014 sebanyak 7.198.

1. Bank BNI

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebuah bank pemerintah di Indonesia. BNI dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang saat ini dijabat oleh Gatot M. Suwondo. BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Saat ini BNI mempunyai 914 kantor cabang di Indonesia dan 5 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah. Didirikan

tahun 1946 dan dipersiapkan menjadi Bank Sirkulasi atau Bank Sentral yang bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang RI. Beberapa bulan setelah pendiriannya, Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama Oeang Republik Indonesia atau ORI.

Pada tahun 1955 peran Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank pembangunan dan kemudian mendapat hak untuk bertindak sebagai bank devisa. Sejalan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank umum dengan penetapan secara yuridis melalui undang-undang darurat No. 2 tahun 1955. Pada tahun yang sama Bank Negara Indonesia membuka cabang pertamanya di luar negeri, yaitu di Singapura (Wikipedia, 2017).

2. Bank BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Berdasarkan undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang undang-undang pokok perbankan dan undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang masih digunakan sampai dengan saat ini (Wikipedia, 2017).

3. Bank BTN

Bank Tabungan Negara atau BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Sejak tahun 2000, bank ini dipimpin oleh Iqbal Latanro sebagai direktur utama.

Cikal bakal BTN dimulai dengan didirikannya Postspaar bank di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942, pada masa pendudukan

Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Tyokin Kyoku. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Kantor Tabungan Pos. Nama dan bentuk perusahaan selanjutnya berubah beberapa kali hingga akhirnya pada tahun 1998 diubah menjadi nama dan bentuk resmi yang berlaku saat ini (Wikipedia, 2017).

4. Bank Mandiri

Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi Bank Mandiri. Sejarah keempat Bank tersebut dapat ditelusuri lebih dari 140 tahun yang lalu. Keempat Bank tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan di Indonesia.

Kini, Bank Mandiri menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa perbankan dan keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari 140 tahun. Masing-masing dari empat Bank bergabung memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi.

Setelah melalui proses panjang dan persiapan yang sangat berat, pada tanggal 14 Juli 2003 akhirnya Bank Mandiri melaksanakan pencatatan saham perdana dengan kode saham BMRI di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada penawaran saham perdana

tersebut, saham Bank Mandiri mengalami *oversubscribed* sebesar lebih dari 7 kali. Proses diinvestasi saham pemerintah pada Bank Mandiri tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah No. 27 tahun 2003 tentang penjualan saham Negara RI pada Bank Mandiri. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa penjualan saham Bank Mandiri akan dilakukan melalui pasar modal atau kepada mitra strategis dengan jumlah maksimal 3% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor.

Dengan kinerja yang semakin membaik dan keberhasilan program transformasi bisnis dalam beberapa tahun terakhir, Bank Mandiri bertekad memasuki tahapan strategis yaitu menjadi salah satu bank terkemuka di kawasan Regional Asia Tenggara. Visi strategis tersebut diawali dengan tahapan mengembangkan kekuatan di semua segmen nasabah untuk menjadi universal bank yang mendominasi pasar perbankan domestik, dengan fokus pada pertumbuhan segmen *consumer* dan *commercial*. Dengan menguasai pasar Indonesia sebagai *fastest growing market* di Asia Tenggara. Bank Mandiri berada dalam posisi lebih menguntungkan dibandingkan pesaing-pesaing regional.

Dalam proses penggabungan dan pengorganisasian ulang tersebut, jumlah cabang Bank Mandiri dikurangi sebanyak 194 buah dan karyawannya berkurang dari 26.600 menjadi 17.620. Direktur Utama Bank Mandiri adalah Budi Gunadi Sadikin.

Pada Maret 2005, Bank Mandiri mempunyai 829 cabang yang tersebar di sepanjang Indonesia dan enam cabang di luar negeri. Selain itu,

Bank Mandiri mempunyai sekitar 2.500 ATM dan tiga anak perusahaan utama yaitu Bank Syariah Mandiri, Mandiri Sekuritas, dan AXA Mandiri.

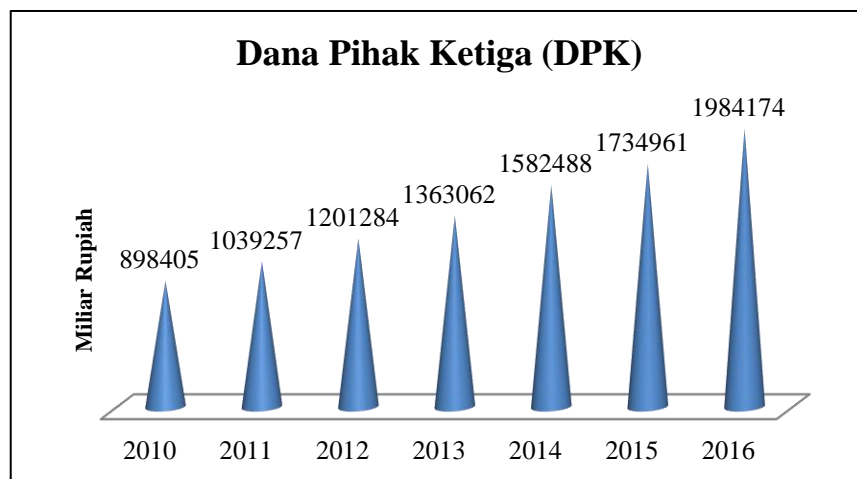
Nasabah Bank Mandiri yang terdiri dari berbagai segmen merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan sektor usaha, nasabah Bank Mandiri bergerak dibidang usaha yang sangat beragam. Sebagai bagian dari upaya penerapan *prudential banking* dan *best-practices risk management*, bank Mandiri telah melakukan berbagai perubahan. Salah satunya, persetujuan kredit dan pengawasan dilaksanakan dengan *four-eye principle*, di mana persetujuan kredit dipisahkan dari kegiatan pemasaran dan business unit. Sebagai bagian diversifikasi risiko dan pendapatan, Bank Mandiri juga berhasil mencetak kemajuan yang signifikan dalam melayani Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan nasabah ritel. Pada akhir 1999, porsi kredit kepada nasabah *corporate* masih sebesar 87% dari total kredit, sementara pada 31 Desember 2009, porsi kredit kepada nasabah UKM dan mikro telah mencapai 42,22% dan porsi kredit kepada nasabah consumer sebesar 13,92%, sedangkan porsi kredit kepada nasabah *corporate* mencakup 43,86% dari total kredit.

Sesudah menyelesaikan program transformasi semenjak 2005 sampai dengan tahun 2009, Bank Mandiri sedang bersiap melaksanakan transformasi tahap berikutnya dengan merevitalisasi visi dan misi untuk menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Pada Juni 2013, Bank Mandiri sudah mempunyai 1.811 cabang

dan sekitar 11.812 ATM yang tersebar merata di 34 provinsi di Indonesia tanpa terkecuali, semakin menegaskan Bank Mandiri sebagai salah satu dari jajaran bank terbesar di Indonesia (Wikipedia, 2017).

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang banyak tersedia di masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang merupakan sumber dana terpenting dan terbesar dalam kegiatan operasional suatu bank. Bank dikatakan berhasil apabila mampu membiayai operasinya dari sumber dana tersebut (Murdiyanto, 2012). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan komposisi atas tabungan giro dan deposito yang diperoleh pihak bank dari masyarakat. Nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) yang semakin besar menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dananya akan semakin besar pula.



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2016 diolah

Gambar 4.3.

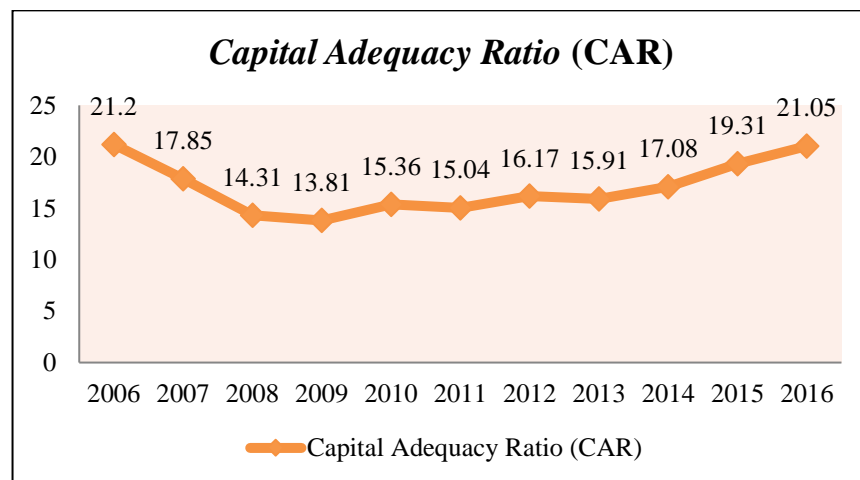
Perkembangan DPK Bank Persero

Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) sejak tahun 2010-2016 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah DPK bank Persero sebesar 898.405 miliar sampai pada tahun 2016 terus meningkat hingga sebesar 1.984.174 miliar. DPK merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penyaluran kredit perbankan. Lebih dari 90% DPK mempengaruhi penyaluran kredit perbankan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan fungsi perantara keuangan (*financial intermediary*), DPK merupakan sumber pendanaan yang utama. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan bank untuk menaikkan DPK dengan sebuah strategi. Menurut Kasmir (2008) strategi yang digunakan oleh bank untuk memperoleh sumber dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya, strategi tersebut yaitu strategi promosi. Strategi promosi merupakan sarana untuk memperkenalkan produk bank kepada masyarakat agar masyarakat tertarik dengan produk-produk tersebut. Inilah upaya yang dilakukan bank untuk menaikkan DPK.

C. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah ketentuan permodalan. (Kasmir, 2008). Modal merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan usaha bank. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal

minimum yang harus selalu dipertahankan setiap bank (Martono dan Hartijo, 2008). Bank persero menunjukkan permodalan yang cukup fluktuatif dari tahun ke tahunnya.



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2016 diolah

Gambar 4.4.

Perkembangan CAR Bank Persero

Pada tahun 2006 memiliki nilai yang tinggi yaitu sebesar 21,20%, tetapi ditahun 2007 hingga 2009 nilai CAR pada bank Persero mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2007 sebesar 17,85% pada tahun 2009 menurun hingga menjadi 13,81%. Sedangkan pada tahun 2010 sampai 2013 kondisi permodalan bank persero cenderung mengalami naik turun yaitu pada tahun 2010 sebesar 15,36%, ditahun 2011 turun sedikit menjadi 15,04%, lalu pada tahun 2012 naik lagi menjadi 16,17%, dan menurun kembali ditahun 2013 menjadi 15,91%. Pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan kembali hingga pada tahun 2016 rasio CAR sebesar 21,05.